

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang mengalami laju pembangunan yang sangat cepat, terutama dalam sektor infrastruktur dan sarana prasarana. Proses pertumbuhan ini terutama terlihat di area perkotaan di mana hampir semua area terbuka yang hijau, yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sebagai penyedia oksigen bagi penduduk, saat ini telah beralih fungsi menjadi bangunan dan infrastruktur perkotaan. Perubahan ini menyebabkan degradasi serius pada kualitas lingkungan, dan menjadi pemicu utama dari masalah polusi yang semakin serius.

Tidak sejalan antara pembangunan gedung dan pelestarian ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas lingkungan. Ketidakseimbangan antara manusia dan lingkungannya menciptakan kondisi di mana perkembangan ekonomi di wilayah perkotaan meningkat, namun keberlanjutan ekologisnya terancam mundur. Meskipun perkembangan ekonomi berkembang pesat, namun lingkungan perkotaan terus mengalami kemunduran yang serius.

Permasalahan di perkotaan saat ini menjadi semakin kompleks, termasuk semakin terbatasnya lahan untuk perumahan bagi masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian yang berada di pinggiran kota menjadi kompleks industri, pemukiman, dan perkantoran juga menjadi salah satu

masalah utama yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan biaya hidup menambah beban bagi warga perkotaan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat di perkotaan, timbul pula masalah lingkungan yang semakin parah. Mulai dari perubahan lahan hingga penurunan kualitas lingkungan karena polusi serta akumulasi sampah menjadi ancaman serius.

Kota Semarang, yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia, merupakan satu dari kota metropolitan besar di Indonesia, menempati posisi kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Berdasarkan Most Livable City Index 2017 yang dirilis Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Semarang dianggap sebagai salah satu kota metropolitan yang memiliki kualitas hunian yang baik, sebanding dengan Denpasar dan Palembang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang termasuk dalam klasifikasi kota yang mengalami pertumbuhan yang cepat. Kepadatan populasi di Kota Semarang cukup signifikan, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2 juta orang, yang mungkin meningkat pada siang hari karena kehadiran pendatang dan aktivitas mereka.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang berdampak signifikan pada pertumbuhan pemukiman, yang mengakibatkan pengurangan area pertanian. Hal ini disebabkan karena konversi banyak lahan kosong menjadi area hunian dan perkantoran. Menurut data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total jumlah keseluruhan

penduduk Kota Semarang mencapai 1.659.975 orang, dengan tingkat kepadatan populasi mencapai 4.441,05 orang per kilometer persegi (BPS, Kota Semarang, 2022).

Kelurahan Bambangrejo, yang terletak di Kota Semarang, mengalami peningkatan penduduk seiring dengan tren pertumbuhan populasi yang juga terjadi di seluruh Kota Semarang, ini terlihat melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Bambangrejo
Tahun 2020 – 2023**

Tahun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kenaikan Penduduk (Jiwa)	Persentase Kenaikan Penduduk
2020	1.974	6.211	0	-
2021	1.982	6.288	77	1,240%
2022	1.989	6.288	69	1,097%
2023	1.998	6.440	83	1,306%

Sumber : Kelurahan Bambangrejo 2023

Dapat dilihat pada tabel bahwa adanya peningkatan jumlah individu Kelurahan Bambangrejo Kota Semarang dari tahun ke tahun berikutnya. Dapat dilihat bahwa pada 2020 terdapat 6.211 jiwa an meningkat pada tahun 2021 menjadi 6.288 jiwa dengan kenaikan jumlah penduduk sebesar 77 jiwa dengan presentase kenaikan 1,240%. Pada tahun 2022 Kota Semarang juga mengalami peningkatan populasi mencapai 6.288 jiwa dengan kenaikan 69 jiwa dengan presentase kenaikan 1,097%. Dan pada tahun 2023 menjadi 6.440 jiwa dengan kenaikan 83 jiwa atau 1,306% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk di Kota Semarang mengakibatkan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi area perkantoran, perumahan, pusat bisnis, perdagangan, dan fasilitas publik lainnya, menyebabkan lahan untuk pertanian semakin terbatas. Dampaknya adalah berkurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal, yang mengharuskan ketergantungan kota terhadap pasokan hasil pertanian dari wilayah di luar Kota Semarang.

Lahan yang berada di Kelurahan Bambangrejo Kota Semarang juga mengalami penurunan seiring dengan peningkatan kepadatan penduduk di Kelurahan Bambangrejo. Terjadi alih fungsi lahan dari area pertanian menjadi zona perumahan atau perkantoran, sehingga menyebabkan semakin berkurangnya lahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertanian. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Luas Lahan Kelurahan Bambangrejo 2020 – 2023

Tahun	Luas Tanah Kering (ha)	Luas Bangunan / Perumahan / Emplasement (ha)	Luas Ladang (ha)	Persentase Penurunan Ladang
2020	324	101	219	0,000%
2021	325	112	207	-5,797%
2022	322	121	201	-2,985%
2023	318	137	189	-6,349%

Sumber: Kelurahan Bambangrejo, 2023

Dapat dilihat pada tabel bahwa adanya penurunan luas lahan kosong di Kelurahan Bambangrejo Kota Semarang dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pada tahun 2020 terdapat 219 hektar lahan dan menurun pada tahun 2021 menjadi 207 hektar dengan penurunan 5,797% dan pada tahun

2022 semakin menurun menjadi 201 hektar dengan penurunan 2,985%. Dan pada tahun 2023 terdapat penurunan lahan menjadi 189 hektar dengan persentase penurunan 6,349%.

Pemangkasan lahan di Kelurahan Bambankerep ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan lahan pertanian, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Dengan adanya pemangkasan lahan, luas area pertanian yang tersedia menjadi terbatas, menyebabkan potensi produksi pangan menjadi terganggu. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas bagi kehidupan masyarakat setempat.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan ketahanan pangan di seluruh lapisan masyarakat melalui gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permetan/Hk.140/4/2015 mengenai Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015.

Dalam meningkatkan standar hidup penduduk perkotaan di suatu wilayah penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Hal ini memastikan bahwa setiap keluarga dan kelompok kecil memiliki akses yang memadai

terhadap pangan yang cukup. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan tanggung jawab nasional yang kuat, sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2021-2026. Rencana tersebut berlandaskan atas urgensi mengenai pentingnya pengembangan sistem ketahanan pangan berdasarkan keragaman sumber daya pangan, struktur kelembagaan yang sesuai, serta memerhatikan kekayaan budaya lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya kecukupan pangan dan gizi, dari segi jumlah, mutu, hingga ekonomis. Serta upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, sesuai dengan peraturan yang diatur Undang-Undang.

Mencermati hal ini, Pemerintah kota Semarang melalui Dinas Pertanian mengembangkan program *Urban Farming* sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui konsep ini, masyarakat perkotaan didorong untuk terlibat dalam kegiatan pertanian dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang terbatas. Tujuan utama dari *Urban Farming* ini tidak hanya menyediakan pangan sehari-hari, namun juga memberikan solusi bagi ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan kosong. Program *Urban Farming* sendiri adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang sudah diimplementasikan di berbagai kota di Indonesia. Konsep ini menekankan pertanian perkotaan yang menggunakan sumber daya alam, tenaga kerja manusia, dan berbagai produk jasa yang tersedia di sekitar daerah urban. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan dari sumber daya yang ada di daerah perkotaan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat perkotaan secara keseluruhan. Melalui *Urban Farming*, diharapkan masyarakat perkotaan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan berkualitas dan menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Terbatasnya lahan yang tersedia mempermudah dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan konsep *Urban Farming*. Dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti bagian atap rumah dan pagar sebagai area bercocok tanam, serta menggunakan sampah sebagai alat dan wadah budidaya, program ini menjadi lebih dapat diimplementasikan. Botol kemasan air minum, kaleng bekas, atau pipa paralon dapat dijadikan wadah untuk budidaya pertanian.

Kelurahan Bambankerep, yang termasuk mendapat bantuan dalam program *Urban Farming*, dipandang oleh Dinas Pertanian sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk dengan strata sosial rendah yang cukup dominan. Dengan populasi penduduk miskin mencapai 504 jiwa dari 168 kepala keluarga, kelurahan ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai jenis usaha produktif.

Dalam pelaksanaan *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep ini masih ada beberapa kendala seperti penurunan hasil panen *Urban Farming* pada tahun 2023 yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Hasil Panen *Urban Farming* Kelurahan

Bambangkerop Tahun 2023

Bulan	Jenis Tanaman	Jumlah	Satuan
Januari	Cabai (Bibit)	356	polybag
	Tomat (Bibit)	333	polybag
	Terong (Bibit)	241	polybag
	Pakcoy (Bibit)	101	polybag
	Kangkung (Bibit)	3	polybag
Februari	Cabai (Bibit)	79	polybag
	Tomat (Bibit)	193	polybag
	Terong (Bibit)	107	polybag
	Pakcoy (Bibit)	20	polybag
Maret	Cabai (Bibit)	65	polybag
	Tomat (Bibit)	16	polybag
	Terong (Bibit)	54	polybag
	Pakcoy (Bibit)	5	polybag
	Jahe, Kencur, Kunci, Sereh (Bibit)	40	polybag
	Cabai (Panen)	1,85	kg
	Tomat (Panen)	21,25	kg
	Terong (Panen)	5	kg
April	Cabai (Panen)	0,5	kg
	Tomat (Panen)	5	kg
	Terong (Panen)	0,75	kg
Mei	Terong (Bibit)	11	polybag
	Cabai (Bibit)	6	polybag
Juni	Cabai (Bibit)	1	polybag
	Cabai (Panen)	2,05	kg
Juli	Cabai (Panen)	0,9	kg
	Sawi (Panen)	5	kg
Agustus	Tomat (Panen)	5	kg
September	Tomat (Panen)	3	kg
Oktober		0	
November		0	
Desember		0	

Sumber : KWT Kembangkerop Lohjinawi Kelurahan Bambangkerop (Data diolah penulis, 2023)

Dapat dilihat dalam tabel bahwa hasil panen *Urban Farming* di Kelurahan Bambangkerop pada tahun 2023 mengalami penurunan yang

sangat signifikan, bahkan pada bulan Oktober serta pada bulan November yang sama sekali tidak ada yang dihasilkan.

Pada tabel di bawah ini juga menunjukkan bahwa pada implementasi pelaksanaan program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep ini masih terkendala dalam kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam berpartisipasi :

**Tabel 1.4 Jumlah Peserta Pertemuan Rutin KWT
Kembangkerep Lohjinawi Tahun 2019 - 2023**

Tahun / Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
Januari			12	18	8
Febuari		13		12	
Maret				14	8
April				8	
Mei					8
Juni				7	
Juli				9	9
Agustus				12	
September		14		8	
Oktober	20		16		8
November	15		23	19	
Desember		15	24	10	
Jumlah	35	42	75	117	33

*Sumber : KWT Kembangkerep Lohjinawi Kelurahan Bambankerep
(Data diolah penulis, 2023)*

Dapat dilihat dalam tabel bahwa jumlah peserta pertemuan rutin KWT Kembangkerep Lohjinawi semakin menurun tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel tahun 2023 jumlah peserta pertemuan KWT Kembangkerep Lohjinawi bahkan tidak mencapai 10 orang dan pertemuan rutin semakin jarang dilakukan tidak rutin tiap bulannya.

Tabel 1.5 Inventaris KWT Kembangkerep Lohjinawi Tahun 2019 - 2023

Tanggal	Jenis Barang	Jumlah	Sumber Barang
11 Oktober 2019	Media Tanam Hidroponik	5 pcs	CSR (PT.PII & Tiga Langkah)
	Polybag	250 pcs	
	Planterbag / Wallplanter	6 pcs	
	Ember	5 pcs	
	Rak	3 buah	
	Mist Pot	250 pcs	
	Pupuk Organik	2 dus	
	AB Mix		
29 Juni 2022	Bibit Jambu	20 batang	Dinas Pertanian Kota Semarang
	Bibit Jeruk	5 batang	
	Bibit Laos	10 batang	
	Bibit Mangga	5 batang	
	Bibit Rambutan	20 batang	
	Bibit Salam	20 batang	
	Bibit Sambiliti	10 batang	
03 Juli 2022	Bibit Cabai	30 batang	Dinas Pertanian Kota Semarang
	Bibit Jahe Merah	15 batang	
	Bibit Jambu	20 batang	
	Bibit Jeruk	15 batang	
	Bibit Mangga	15 batang	
	Bibit Terong	15 batang	
	Bibit Tomat	15 batang	
09 Agustus 2022	Gunting Taman	1 buah	Dinas Pertanian Kota Semarang
	Paranet	1 roll	
	Pot Besar	3 buah	
	Pisau Okulasi	1 unit	
	Pipa Pot	4 batang	
14 November 2022	Gembor	10 pcs	Dinas Ketahanan Pangan
	Sekop	10 pcs	
	Selang Air	20 meter	
	Keranjang	10 pcs	
	Semetrai	10 pcs	
	Sekop Tanam	10 pcs	
	Garpu Cabut Tanam	10 pcs	
	Plang nama	2 pcs	
	Timbangan Digital	1 unit	
	Rak Tanaman	10 pcs	
	Tanki Air	1 pcs	
	Rumah Bibit	1 unit	

*Sumber : KWT Kembangkerep Lohjinawi Kelurahan Bambankerep
(Data diolah Penulis, 2023)*

Berdasarkan tabel yang disajikan, terlihat bahwa sarana dan prasarana bantuan dari pemerintah, baik melalui Dinas Pertanian maupun Dinas Ketahanan Pangan, telah mulai menurun secara signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, bantuan tersebut bahkan tidak diberikan sama sekali. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan komitmen dari pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dapat dilihat bahwa Dinas terakhir yang memberi bantuan kepada adalah pada bulan November 2022. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, karena tanpa dukungan yang memadai, upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan di tingkat lokal menjadi terhambat.

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” dalam kajian Administrasi Publik. Metode penelitian yang akan diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pelaksanaan program di Kelurahan Bambangrejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

1.2 Perumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program *Urban Farming* Di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang diajukan oleh peneliti dalam skripsi ini, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Menganalisis Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program *Urban Farming* Di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti, studi ini memberikan manfaat dalam hal pemahaman dan wawasan terkait Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
2. Bagi dunia pendidikan, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berperan dalam mengembangkan pemahaman, khususnya mengenai

program *Urban Farming*, dan memberikan manfaat yang signifikan pada pembangunan saat ini dan di masa mendatang.

3. Bagi pembaca, diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan, panduan, dan sumber informasi dalam menilai seberapa besar pengetahuan, penerapan, respons masyarakat, dan potensi lahan dalam pelaksanaan Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
4. Bagi Pemerintah, penelitian ini memiliki nilai sebagai pengetahuan tentang urgensi Program *Urban Farming* yang dapat ditingkatkan lagi dalam pengembangannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan manfaat dan nilai bagi berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai hal ini, penulis mengkategorikan manfaat penelitian menjadi dua kelompok berbeda: teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis :

- a) Dapat mengetahui Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
- b) Peneliti ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu, pengetahuan serta pemahaman terbaru untuk peneliti
- c) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu, pengetahuan pembaca tentang Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

2. Kegunaan Secara Praktis :

- a) Bagi peneliti, harapannya penelitian ini berguna untuk wawasan serta pengetahuan mengenai Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- b) Bagi pembaca, harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi, pedoman, dan pengetahuan dalam mengevaluasi sejauh mana tingkat pengetahuan, respons masyarakat, penerapan, dan potensi lahan dalam pelaksanaan Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
- c) Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber masukan yang berharga dalam merumuskan kebijakan terkait Program *Urban Farming* agar dapat ditingkatkan lebih lanjut.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Rahmad Aji Maulana, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, & Teuku Afrizal "*Urban Farming: Program Pemanfaatan Lingkungan Untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang*" bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dan manfaat tambahan melalui pertanian perkotaan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanian perkotaan tidak hanya tumbuh karena keterbatasan lahan, tetapi juga memberikan manfaat seperti stabilitas pangan, pembelajaran bagi masyarakat, pelestarian lingkungan, pemeliharaan kualitas udara,

pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan peluang ekonomi bagi masyarakat yang belum bekerja.

Penelitian lain oleh Olivia Agustin Nailatul Wardah tentang "Strategi Ketahanan Pangan melalui *Urban Farming* di Surabaya" menyoroti efektivitas upaya Pemerintah Surabaya dalam meningkatkan pemanfaatan program *Urban Farming* oleh masyarakat. Namun, diperlukan peningkatan dalam sosialisasi dan promosi program.

Penelitian H. Muhammad Amir dan Saidin tentang "Pengembangan *Urban Farming* di Kota Kendari" menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat karena kurangnya manajemen profesional dan dampak ekonomis yang minim.

Penelitian Ardyan Rakhmad Pradana dan Wahyu Nurharjadmo tentang "Implementasi *Urban Farming* di Lakarsantri" menunjukkan keberhasilan program karena komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, serta struktur birokrasi yang terarah.

Penelitian Shinta Amelia dan Ertien Rining Nawangsari tentang "Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Jeruk" menggambarkan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah terimplementasi dengan baik, masih ada tantangan dalam hubungan interorganisasional dan pemahaman masyarakat terhadap program tersebut.

Penelitian "*Management of Slum-Based Urban Farming and Economic Empowerment of the Community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia.*" oleh Batara Surya, Syafri Syafri, Hadijah Hadijah,

Baharuddin Baharuddin, Andi Tenri Fitriyah, dan Harry Hardian Sakti bertujuan menganalisis pengaruh motivasi usaha, kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan usaha ekonomi terhadap pemberdayaan ekonomi dalam menangani permukiman kumuh. Penelitian menunjukkan bahwa seluruh faktor tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi.

Selanjutnya penelitian "*Impact of Urban Farming technology on urban community in Malaysia.*" oleh Rasmuna Mazwan Muhamma, Nik Rozana Nik Mohamed Masdek, Mohd Tarmizi Haimid, Siti Zahrah Ponari, dan Zulhazmi Sayut bertujuan mengidentifikasi efektivitas *Urban Farming* dalam mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga. Studi ini menemukan bahwa *Urban Farming* bermanfaat dalam meningkatkan penyediaan sayuran bergizi, memperbaiki penampilan kompleks perumahan, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Penelitian "*Urban Farming as a slum settlement solution (study on slum settlements in Tanjung Merdeka Village, Makassar City)*". oleh B Surya, D N A Ahmad, R S Bahrin, dan H Saleh bertujuan menganalisis tipologi dan penanganan permukiman kumuh melalui *Urban Farming* di Kampung Tanjung Merdeka, Kota Makassar. *Urban Farming* memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kemudian penelitian "*Community-Based Urban Farming in Yogyakarta: Building Social Capital and Resilience for Sustainable*

Empowerment Family" oleh Fahmi Rafika Perdana bertujuan mengkaji pemberdayaan berbasis Kelompok Tani Dewasa di Desa Bausasran, Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan potensi keberlanjutan dalam modal sosial dengan dukungan dari berbagai pihak, meskipun masih ada kendala seperti kurangnya kesadaran terhadap pertanian perkotaan.

Selanjutnya penelitian "*Performance of Agricultural Extension Workers in Implementing Urban Agriculture Programs in Banyumanik District, Semarang City, Indonesia*". oleh Agus Subhan Prasetyo, Anisa Nurina Aulia, dan Agung Sebastian Sinaga bertujuan mengevaluasi kinerja penyuluh dalam program *Urban Farming* di BPP Kramas, Banyumanik. Hasilnya menunjukkan tingkat kinerja penyuluh yang tinggi dalam persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, menandakan kesuksesan pelaksanaan program *Urban Farming*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu terkait tentang implementasi program *Urban Farming*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus dan lokus. Penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai Implementasi Program *Urban Farming* terutama pada lokus Kelurahan Bambankerep. Serta perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III untuk mendeskripsikan implementasi program *Urban Farming*.

Penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas disajikan dalam Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Rahmad Aji Maulana, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, & Teuku Afrizal, 2022	<i>Urban Farming: Program Pemanfaatan Lingkungan Untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang</i>	Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan manfaat tambahan (co-benefits) melalui pengembangan pertanian perkotaan (Urban Farming) di Kota Semarang.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Temuan menunjukkan bahwa aktivitas pertanian perkotaan tidak hanya berkembang karena keterbatasan lahan yang tersedia. Berdasarkan analisis manfaat lainnya, terdapat berbagai manfaat dari Urban Farming atau pertanian perkotaan yang dapat dirasakan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain sebagai penyediaan stabilitas pangan, sarana pembelajaran bagi masyarakat, upaya pelestarian lingkungan yang hijau, pengaturan kualitas suhu udara, memenuhi kebutuhan ekonomi, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang belum bekerja, dan masih banyak manfaat lainnya.

2.	Olivia Agustin Nailatul Wardah, 2021	Strategi Ketahanan Pangan Dalam Program <i>Urban Farming</i> Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Surabaya	Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman, menggambarkan, dan menjelaskan upaya strategi ketahanan pangan melalui program pertanian perkotaan yang diinisiasi oleh DKPP Kota Surabaya.	Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini adalah melalui studi pustaka.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan peran dan langkah-langkahnya dengan efektif. Ini terlihat dari adanya peningkatan tren positif dalam partisipasi masyarakat Kota Surabaya dalam program Urban Farming. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan dalam proses sosialisasi dan promosi agar program ini dapat berjalan lancar tanpa kendala.
3.	H. Muhammad Amir, dan Saidin, 2020	Pengembangan <i>Urban Farming</i> Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Kendari	Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan pengembangan pengembangan Urban Farming oleh komunitas perkotaan di Kota Kendari dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat.	Penganalisisan data menggunakan metode kualitatif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan metode Miles & Huberman (1992).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pengembangan Urban Farming telah dilakukan, namun belum mampu memberdayakan masyarakat secara menyeluruh karena produk yang dihasilkan masih bersifat lokal dan belum dikelola secara profesional. Secara umum, partisipasi masyarakat cenderung didasarkan pada kepuasan pribadi sehingga belum memberikan dampak ekonomis yang signifikan, yang menyebabkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam hal swadaya dan swadana.

4.	Ardyan Rakhmad Pradana, Wahyu Nurharjadmo, 2021	Analisis Keberhasilan Implementasi Program Pertanian Perkotaan di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Urban Farming di Kelurahan Lakarsantri.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskripsi.	Dari hasil penelitian, terlihat bahwa kesuksesan program Urban Farming di Lakarsantri terjadi karena adanya komunikasi yang efektif, jelas, dan konsisten; tersedianya sumber daya yang memadai seperti kelompok tani, lahan, bibit, anggaran untuk pelatihan, serta peralatan pertanian; sikap terbuka dari pelaksana yang mampu membangun kepercayaan di antara semua pihak terlibat; dan struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik.
5.	Shinta Amelia, Ertien Rining Nawangsari, 2021.	Implementasi Program <i>Urban Farming</i> Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19	Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi program Urban Farming sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan pangan selama masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.	Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tujuan kebijakan dan standar program Urban Farming telah ditetapkan dengan jelas; (2) sumber daya kebijakan, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan waktu, telah diimplementasikan secara menyeluruh; (3) karakteristik dari lembaga pelaksana telah dijalankan secara optimal; (4) kualitas hubungan antarorganisasi telah dijalankan, namun belum optimal dalam hal komunikasi yang tepat, akurat, dan konsisten; (5) kondisi politik, sosial, dan ekonomi lingkungan telah diimplementasikan, tetapi belum optimal dalam konteks politik; (6) disposisi atau sikap para pelaksana telah diimplementasikan, namun belum optimal dalam pemahaman dan penggalan lebih lanjut, dengan masih ada masyarakat yang

					belum sepenuhnya memahami program Urban Farming.
6.	Batara Surya, Syafri Syafri, Hadijah, Baharuddin Baharuddin, Andi Tenri Fitriyah and Harry Hardian Sakti. 2020.	<i>Management of Slum-Based Urban Farming and Economic Empowerment of the Community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia</i>	Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengevaluasi pengaruh motivasi berusaha, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan manajemen usaha ekonomi terhadap pemberdayaan ekonomi dalam penanganan permukiman kumuh; (2) menilai dampak secara langsung dan tidak langsung dari praktik Urban Farming; (3) merumuskan model berkelanjutan untuk pengelolaan permukiman kumuh yang melibatkan masyarakat di	Metode penelitian yang diterapkan adalah desain penelitian sequential explanatory, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, survei, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi usaha, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan manajemen usaha ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi. Urban Farming telah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 27,66%, memperkuat kapasitas masyarakat sebesar 55,95%, dan memberikan dukungan modal usaha sebesar 36,72% untuk peningkatan kesejahteraan. Praktik Urban Farming, peningkatan kapasitas masyarakat, dan dukungan modal usaha berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di permukiman kumuh, dengan kelangsungan melibatkan pengembangan infrastruktur, ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat.

			kawasan Metro Tanjung Bunga.		
7.	Rasmuna Mazwan Muhamma, Nik Rozana Nik Mohamed Masdek, Mohd Tarmizi Haimid, Siti Zahrah Ponari and Zulhazmi Sayut, 2020.	<i>Impact of Urban Farming technology on urban community in Malaysia</i>	penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas <i>Urban Farming</i> dalam menekan biaya pengeluaran rumah tangga.	Penelitian ini mengadopsi pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif melalui penggunaan kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara tatap muka.	Studi ini mengungkapkan bahwa pertanian perkotaan telah bermanfaat bagi masyarakat perkotaan serta menciptakan kesadaran melalui penyediaan sayuran bergizi untuk rumah tangga, memperbaiki penampilan kompleks perumahan dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.
8.	B Surya, D N A Ahmad, R S Bahrun and H Saleh, 2020.	<i>Urban Farming as a slum settlement solution (study on slum settlements in Tanjung Merdeka Village, Makassar City)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi, permukiman kumuh, serta arah dan strategi penanganan permukiman kumuh melalui penerapan konsep <i>Urban Farming</i> .	Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	Pembangunan perkotaan tanpa memperhatikan masyarakat miskin dapat menyebabkan permukiman kumuh. Penelitian ini menunjukkan bahwa Urban Farming memberikan kontribusi positif sebesar 89,69% terhadap produktivitas ekonomi dalam mengatasi permukiman kumuh, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

9.	Fahmi Rafika Perdana, 2020.	<i>Community-Based Urban Farming in Yogyakarta: Building Social Capital and Resilience for Sustainable Empowerment Family</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi pemberdayaan Kelompok Tani Dewasa dengan melibatkan anggota keluarga serta memanfaatkan modal sosial yang dimiliki oleh anggota BKK Gemah Ripah di Desa Bausasran Kota Yogyakarta.	Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan menggunakan purposive sampling untuk menentukan informan sampel.	Penelitian menemukan bahwa upaya pemberdayaan memiliki potensi keberlanjutan melalui modal sosial yang dijaga dan diperbarui dalam dinamika AFG. Dukungan dari berbagai pihak, seperti warga, pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan media, mendukung keberlanjutan ini. Kendala yang dihadapi melibatkan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap pertanian perkotaan, terutama dari kaum muda yang lebih sulit untuk diberdayakan, serta kendala kesibukan yang umum dihadapi oleh masyarakat perkotaan.
10.	Agus Subhan Prasetyo, Anisa Nurina Aulia, Agung Sebastian Sinaga, 2020	<i>Performance of Agricultural Extension Workers in Implementing Urban Agriculture Programs in Banyumanik District, Semarang City, Indonesia</i>	Penelitian ini untuk mengetahui tingkat kinerja penyuluh dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program penyuluhan <i>Urban Farming</i> di BPP Kramas Kabupaten Banyumanik.	Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif dengan memanfaatkan skala Likert.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja penyuluh dalam persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi, dan pelaporan berada pada kategori tinggi, dengan persentase pencapaian rata-rata sebesar 96%. Artinya program <i>Urban Farming</i> di Kecamatan Kramas Banyumanik telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun

1.5.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1998) (Rahman, 2017, p. 18), menyatakan Administrasi Publik adalah seni dan ilmu yang berusaha mengelola berbagai kebijakan publik untuk mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat atau organisasi dengan mengoordinasikan sumber daya dan pegawai publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Nicolas Henry dalam (Rahman, 2017, p. 19) juga menambahkan bahwa dalam administrasi publik terdapat berbagai elemen yang kompleks yang digabungkan menjadi teori dan praktik, dengan tujuan untuk menyebarkan pemahaman kepada masyarakat sebagai instrumen yang melaksanakan kebijakan pemerintah serta meningkatkan respons terhadap kebijakan publik yang memenuhi beragam kepentingan masyarakat. Dari perspektif ini, dapat diamati bahwa administrasi publik adalah integrasi yang kompleks antara konsep teoritis dan penerapan praktis dalam mengoordinasikan implementasi kebijakan pemerintah dengan mengikuti sejumlah nilai normatif yang diakui dalam masyarakat.

Sementara itu Caiden (1984) mengungkapkan Administrasi Publik melibatkan kebijakan, perencanaan, tujuan, dan sasaran, kerjasama dengan organisasi dan lembaga legislatif untuk mendapatkan dukungan masyarakat, pengaturan dan modifikasi organisasi, mobilisasi dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, manajemen, dan tugas lainnya. Menurut berbagai teori, administrasi publik adalah gabungan rumit dari teori dan praktik yang digunakan oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua ini dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn (sebagaimana yang disebutkan dalam Keban, 2014), Paradigma adalah kerangka pemikiran, prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, metode, atau strategi untuk mengatasi masalah yang dianut oleh komunitas ilmiah selama beberapa waktu. Namun, ketika suatu paradigma menghadapi masalah atau mengalami krisis, kepercayaan pada paradigma tersebut dapat berkurang, dan para ilmuwan mungkin mulai mencari paradigma lain yang sesuai atau bahkan menciptakan paradigma baru. Nicholas Henry juga menjelaskan bahwa standar dalam suatu disiplin ilmu, seperti yang disebutkan oleh Robert T. Geolembiewski, mencakup dua aspek yaitu fokus dan lokus. Fokus mengacu pada metode dasar atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah, sementara lokus merujuk pada area atau bidang di mana metode tersebut diterapkan. Perubahan paradigma sering terjadi dalam perkembangan ilmu administrasi publik.

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Dikenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh yang populer dalam paradigma ini adalah Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow. Awal muncul paradigma ini dipelopori oleh Wilson. Pemisahan politik dan administrasi ini sebagaimana ‘trias politica’ suatu teori yang memisahkan kekuasaan antara legislatif dengan tugas menyampaikan

masuk-masukan dari rakyat, badan eksekutif yang bertugas untuk mengimplementasikan keputusan, hingga badan yudikatif pada saat yang sama membantu badan legislatif dalam merumuskan dan menetapkan tujuan kebijakan. Seharusnya antara politik dan administrasi tersebut sama-sama dibutuhkan dan harus adanya saling pengertian dan kerja sama yang harmonis demi tercapainya tujuan negara. Pada paradigma pertama ini, hanya menekankan pada "lokus" administrasi negara, yang terpusat pada birokrasi pemerintah, tanpa mempertanyakan "fokus"nya.

2. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Munculnya buku "Principles of Public Administration" karya Willoughby, di mana di dalamnya dinyatakan bahwa administrasi negara memiliki aspek universal, yakni "prinsip-prinsip administrasi negara" yang bisa diaplikasikan di seluruh cabang pemerintahan. Prinsip-prinsip administrasi yang dimaksud disebut dengan POSDCORB, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgeting*. Prinsip-prinsip tersebut menurut Willoughby, Gullick & Urwick bersifat universal atau dapat diterapkan dimana saja. Pada paradigma ini, locus administrasi publik tidak ditegaskan dengan jelas karena dianggap bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di berbagai tempat, termasuk dalam organisasi pemerintahan. Pada paradigma 2 ini, lokasi di mana prinsip tersebut diterapkan tidak begitu penting. Fokus memiliki peran yang lebih signifikan daripada lokus.

3. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Simon memulai perdebatan tentang perbedaan antara administrasi dan politik dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi memiliki kontradiksi dan dia percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku untuk semua orang. Pendapat Morstein-Marck baru-baru ini muncul, mempertanyakan kemungkinan dan ketidakmungkinan pemisahan ekonomi dan politik. Nilai-nilai tertentu selalu mempengaruhi administrasi negara dalam hal ini, dan ini tidak berlaku di mana pun. Administrasi yang bebas nilai dan politik yang sarat nilai bertentangan. Dalam praktiknya, jika diasumsikan bahwa keduanya berlaku, maka teori administrasi publik pada dasarnya juga merupakan teori politik, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Gaus. Dengan demikian, paradigma baru—administrasi negara sebagai ilmu politik—muncul. Paradigma ini menganggap administrasi publik sebagai cabang ilmu politik yang berfokus pada birokrasi pemerintahan dan memiliki fokus yang abstrak karena kekurangan prinsipnya. Paradigma ini berfokus pada birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini memfasilitasi kemajuan ilmiah lebih lanjut dari prinsip-prinsip manajemen umum. Fokusnya adalah pada pemanfaatan teknologi baru, seperti studi perilaku organisasi, analisis manajerial, metode kuantitatif, analisis sistem, dan penelitian operasional.

Paradigma ini berkembang dalam dua arah. Salah satunya berpusat pada pengembangan ilmu administrasi murni yang terkait dengan psikologi sosial, sementara yang lainnya berkaitan dengan kebijakan publik. Semua fokus yang dibahas dapat diterapkan dalam konteks administrasi publik, bukan hanya dalam bisnis. Oleh karena itu, masalah "lokasi" administrasi negara masih belum terselesaikan karena masih terdapat kendala dalam paradigma 4. Isu politik "lokasi" di tingkat nasional belum teratasi. Sebagai akibatnya, pemerintah tengah mencari paradigma baru yang dapat mencakup lokus dan fokusnya.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Usulan gagasan Simon yang pernah diajukan pada paradigma 2 sebagai reaksi terhadap perlakuan ilmu politik, ternyata pada paradigma 5 ini telah memperoleh validasi. Pada era ini, administrasi negara telah menjadi sebuah disiplin mandiri yang dikenal sebagai ilmu administrasi publik, terutama dalam hal teori organisasi. Fokus dari administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Sementara itu, pusat perhatian (lokus) adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas.

6. Paradigma 6: Governance (1990-sekarang)

Governance adalah sebuah kerangka kerja yang melibatkan sistem nilai, kebijakan, dan struktur institusi, di mana urusan-urusan ekonomi,

sosial, dan politik diatur melalui hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Paradigma ini menekankan pada mekanisme dan proses yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kepentingan mereka dan menjalankan hak serta tanggung jawab mereka. Diharapkan bahwa pemerintah dapat berperan dalam membentuk suasana politik dan hukum yang mendukung dan stabil. Dalam bukunya "Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi *Good Governance*", Pandji Santosa menjelaskan tentang pilar-pilar yang ada dalam paradigma ini, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ini merupakan perbedaan mendasar dengan paradigma lain yang lebih menitikberatkan pada konsep government, yang menyoroti peran pemerintahan dalam administrasi. Perubahan dari fokus government ke governance menekankan integrasi antara stabilitas pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*), sehingga paradigma ini menuju pada praktik pemerintahan yang berkualitas (*good governance*).

1.5.4 Kebijakan Publik

Menurut Woll dalam Tangkilisan (Tangkilisan, 2003 : 2) kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah untuk menemukan solusi dalam masyarakat secara langsung atau melalui lembaga yang berpengaruh dalam hidup masyarakat.

Thomas R Dye yang dikutip Islamy (Islamy, 2009 : 19) menjelaskan kebijakan publik sebagai sesuatu yang dipilih untuk dilakukan atau yang

tidak oleh pemerintah. Definisi ini menekankan pada pelaksanaan "tindakan" daripada hanya sekadar pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik.

Banyak ahli mengartikan kebijakan publik sebagai kegiatan pemerintah guna merespon terjadinya masalah atau krisis publik. Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (Tangkilisan, 2003) juga menyatakan hal yang sama bahwa kebijakan publik adalah memanfaatkan sumber daya dengan strategis guna memecahkan masalah publik atau pemerintah. Selain itu, dijelaskan juga bahwa kebijakan publik adalah bentuk intervensi yang berkesinambungan dari pemerintah untuk kepentingan kelompok yang kurang beruntung, sehingga mereka dapat bertahan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan secara menyeluruh.

Dari uraian tentang kebijakan publik yang telah dipaparkan, disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan tindakan dari pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang mudah dipahami. Proses pembuatan kebijakan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilewati oleh pemerintah, dimulai dari perumusan hingga implementasi kebijakan tersebut.

1.5.4.1 Tahap – Tahap Kebijakan

Dalam penyusunan kebijakan publik, berbagai tahapan diperlukan karena melibatkan proses yang harus dianalisis oleh para ahli atau pakar yang memahami proses pengkajian kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar kebijakan publik dapat dievaluasi dengan lebih baik. William Dunn dalam

(Winarno, 2007) memilah kebijakan publik menjadi serangkaian tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Birokrat atau pembuat kebijakan memilih dan menetapkan masalah yang akan dimasukkan dalam agenda publik. Sebelum masalah tersebut dianggap sebagai prioritas dan dimasukkan dalam agenda kebijakan, tahap seleksi dilakukan. Setelah itu, masalah-masalah yang telah diprioritaskan dimasukkan dalam proses formulasi kebijakan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Diharapkan para pengambil kebijakan segera membahas isu-isu yang menjadi prioritas dalam agenda kebijakan dan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan alternatif kebijakan yang telah disiapkan. Pada tahap ini aktor politik mempertimbangkan dan memutuskan keputusan yang dianggap optimal.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Setelah mendapat alternatif-alternatif kebijakan, para pembuat kebijakan memilih satu alternatif dan mengkolaborasikannya melalui dukungan mayoritas suara di lembaga legislatif.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan ditetapkan sebagai solusi penyelesaian permasalahan dan segera dilaksanakan oleh pengambil kebijakan. Kepentingan yang berbeda berperan selama tahap implementasi kebijakan. Ada partai

politik yang mendukung penerapan kebijakan tersebut, ada pula yang menentang karena tidak setuju dengan kebijakan yang diambil.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik biasanya dilakukan dengan harapan dapat mencapai hasil yang diinginkan, yaitu untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Setelah kebijakan atau program diimplementasikan, evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Evaluasi ini menggunakan ukuran dan kriteria tertentu sebagai dasar penilaiannya.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah mekanisme yang melibatkan beberapa tahapan dalam penyusunannya, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan yang telah dilegitimasi, hingga evaluasi keseluruhan proses dari awal hingga akhir.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 21) mendefinisikan bahwa inti dari implementasi adalah upaya perwujudan kebijakan melalui kegiatan yang dilakukan implementor untuk mendistribusikan policy output pada target group. Implementasi menurut Guntur Setiawan (2004 : 39) adalah perluasan aktivitas yang saling menyelaraskan proses interaksi tujuan dan tindakan serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif

Menurut Presman dan Wildavsky, sebagaimana dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:20), implementasi memiliki tiga elemen kunci, yakni melakukan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji yang tercantum dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), serta menghasilkan hasil sesuai dengan tujuan kebijakan (*to produce*), serta menyelesaikan tugas yang harus diwujudkan dalam pencapaian tujuan kebijakan (*to complete*). Menurut Hanifah Harsono (Harsono, 2002), implementasi merujuk pada proses menjadikan kebijakan menjadi tindakan dalam ranah administratif dari politik. Melalui penjabaran pengertian diatas menunjukkan bahwa implementasi merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan aturan tertentu guna mencapai tujuan.

1.5.5.1 Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan menurut beberapa ahli yaitu pertama, model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dalam Syahrudin (2018), proses implementasi kebijakan adalah proses yang vital karena meskipun kebijakan itu sendiri bagus, jika implementasinya tidak dipersiapkan atau tidak direncanakan dengan baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, di mana berbagai faktor saling berinteraksi dan memengaruhi pelaksanaannya. Faktor-faktor ini perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana dampaknya terhadap implementasi kebijakan. (Syahrudin, 2018).

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada seberapa baik para pembuat keputusan memahami apa yang harus mereka lakukan, dan hal ini hanya dapat tercapai melalui komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, keputusan kebijakan atau aturan implementasi harus disampaikan dengan jelas kepada para pelaksana yang tepat. Selain itu, kebijakan yang disampaikan haruslah tepat, akurat, dan konsisten. (Syahrudin, 2018:58).

b. Sumber Daya

Kedua, Sumber Daya. Menurut Edward III dalam Syahrudin (2018:60-61), sumber daya menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya, termasuk Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, serta Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

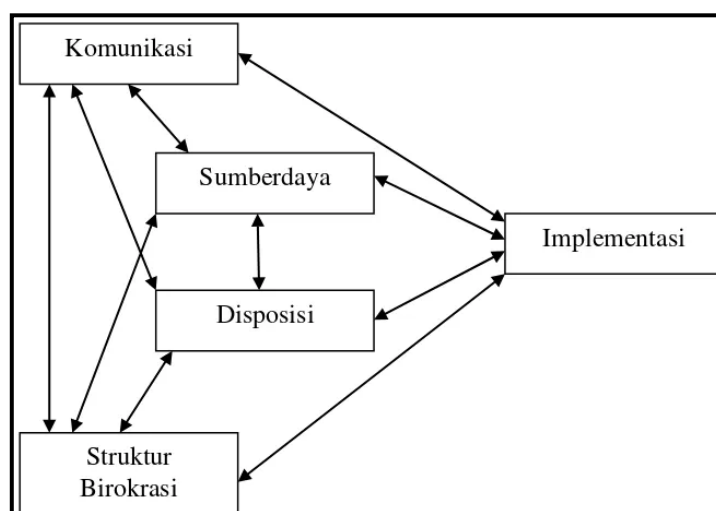
c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Ketiga, Edward menyatakan bahwa disposisi merupakan kondisi di mana implementasi kebijakan akan berhasil jika pelaksana kebijakan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakannya, tanpa adanya pengaruh dari bias. Sikap para pelaksana merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan; jika mereka setuju dengan kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusiasme,

tetapi jika mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi akan sulit. (Syahrudin, 2018:62).

d. Struktur Birokrasi

Keempat, Struktur birokrasi menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan yang rumit karena memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak sejalan dengan kebijakan yang ada, hal ini bisa menyebabkan pemborosan sumber daya dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politis dengan melakukan koordinasi yang efektif. (Syahrudin, 2018:63). Menurut Edward, terdapat dua ciri utama dari birokrasi, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.



Gambar 1. 1 Model Implementasi George C. Edward III

Sumber : George C. Edward III (Syahrudin, 2018:63)

Kedua, model implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn (dikutip dalam Parsons, 1995:461), Perilaku organisasi, baik publik maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu disebut implementasi kebijakan. Indikator kinerja ditunjukkan dalam model ini sebagai langkah penting dalam evaluasi implementasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk menentukan seberapa jauh tujuan kebijakan tercapai dan untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang tujuan tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan, ada enam variabel yang saling berhubungan antara kebijakan dan kinerja. Van Meter dan Van Horn (seperti yang dikutip dalam Winarno, 2007:156) telah merinci proses implementasi kebijakan lebih lanjut, termasuk :

a. Ukuran Dasar dan Tujuan

Dalam analisis implementasi kebijakan, kebijakan kinerja adalah langkah penting karena kinerja digunakan untuk mengukur seberapa baik kebijakan telah diterapkan atau direalisasikan.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan dapat berdampak pada pelaksanaan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya yang berkontribusi pada kesuksesan implementasi.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Keakuratan komunikasi dengan aktor politik saat menyebarkan informasi merupakan indikator penting pencapaian tujuan politik yang tepat. Koordinasi merupakan langkah dalam implementasi kebijakan

dimana komunikasi yang berkualitas membantu meminimalkan kemungkinan kesalahan dan sebaliknya.

d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

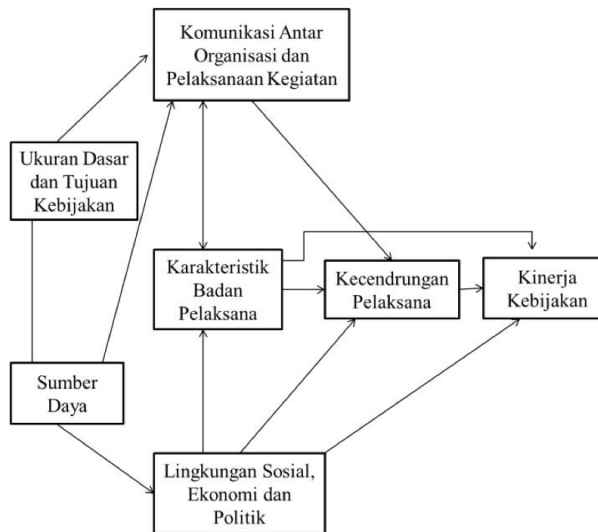
Organisasi swasta dan publik yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan termasuk dalam badan pelaksana. Struktur birokrasi mengacu pada kebiasaan, sifat, dan cara suatu organisasi berhubungan dengan kebijakan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Evaluasi pelaksanaan bergantung pada pengaruh kondisi ekonomi, sosial, dan politik, ini menjadi perhatian penting. Keberhasilan lembaga pelaksana sangat dipengaruhi oleh komponen ini.

f. Kecenderungan pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kesadaran dan keterlibatan penuh dari para pelaksana. Terdapat anggapan bahwa kegagalan implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh kurangnya kinerja dari para pelaksana kebijakan.



Gambar 1. 2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Sumber : Agustino (2006)

Ketiga, menurut Merilee S Grindle (1980: 7), model implementasi adalah suatu proses manajemen yang dianalisis dan diamati dalam pelaksanaan suatu program tertentu. Grindle juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dalam konteks implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan :

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

Pelaksanaan lebih mudah jika kepentingan kelompok lebih besar. Ada kemungkinan bahwa pelaksanaan kebijakan akan berjalan lancar jika tidak merugikan pihak mana pun.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Apabila kebijakan dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, penerapan kebijakan menjadi lebih mudah.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Semakin besar jumlah perubahan kebijakan yang diinginkan, semakin sulit untuk dilaksanakan.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Kepatuhan dipengaruhi oleh kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi hukum.

e. Aktor pelaksana program

kemampuan aktor pelaksana untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan kebijakan.

f. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang tepat dan tingkat kapasitas yang tepat.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan serta oleh siapa pelaksanaannya dilakukan. Kemudahan dan tingkat dukungan kelompok sasaran dalam melaksanakan tindakan politik sangat bergantung pada kapasitas dan kualitas pelaksana politik. Konteks implementasinya adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor

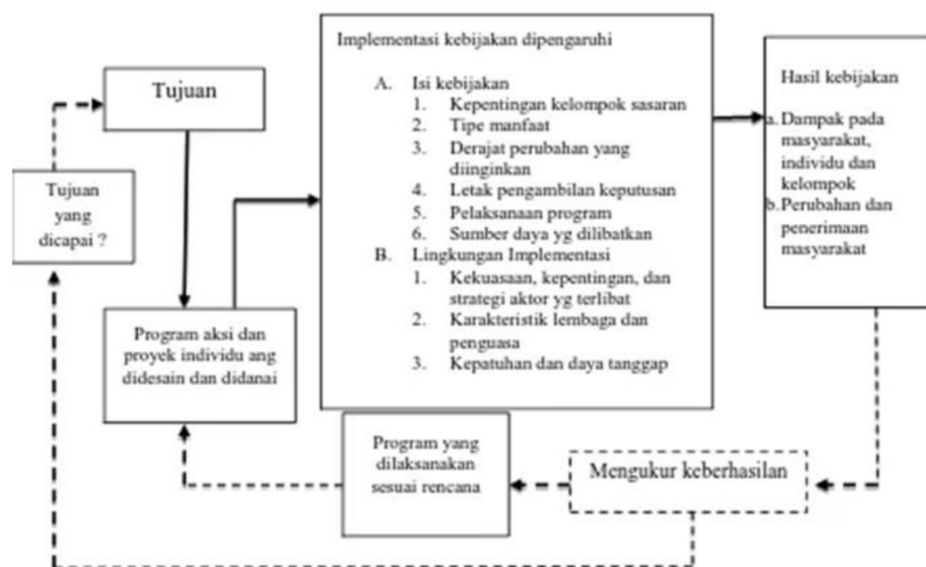
Keterlibatan kekuatan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang berperan memengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Hal ini mengacu pada lembaga dan pemerintah yang memiliki kekuasaan sebagai wadah untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang dijalankan.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Bagaimana tingkat kepatuhan dan tanggapan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh para eksekutor, serta respons dari para eksekutor terhadap implementasi yang dilakukan .



Gambar 1. 3 Model Implementasi Merilee S.Grindle

Sumber : Grindle (1980:11)

Dari uraian mengenai implementasi kebijakan yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Semarang, peneliti akan menerapkan model teori implementasi kebijakan yang digagas oleh George C. Edward III.

1.5.6 Implementasi Program

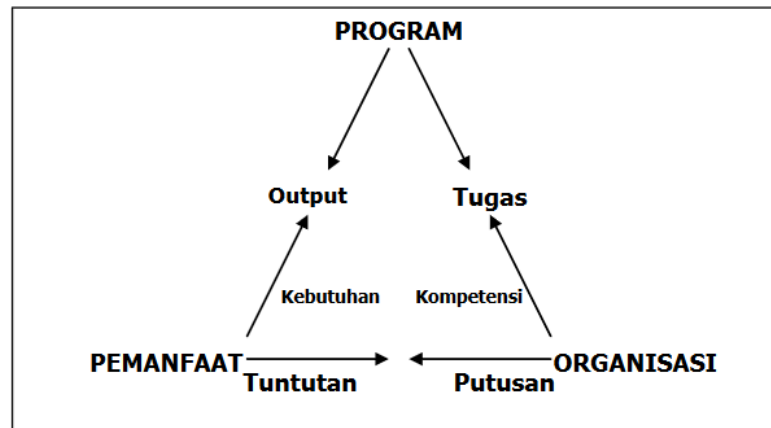
Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) mengungkapkan bahwa program merupakan salah satu komponen dari suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana (2009: 28), terdapat tiga pilar aktivitas yang menjadi dasar dalam menjalankan program, yaitu :

- a. Adanya struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik sangat penting dalam menjalankan program, sehingga memungkinkan terbentuknya tim pelaksana yang terdiri dari tenaga kerja kompeten dan berkualitas, yang secara signifikan memengaruhi stabilitas struktur organisasi.
- b. Para pelaksana program seharusnya memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan petunjuk teknis dan prosedur pelaksanaan dengan baik, sehingga dapat menjalankan program sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, dan dengan demikian, mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal.
- c. Diperlukan pembuatan prosedur kerja yang terperinci untuk menerapkan atau melaksanakan program tersebut. Hal ini bertujuan agar jalannya program sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dan tidak bertabrakan dengan program lainnya.

1.5.6.1 Model Implementasi Program

Salah satu model implementasi program, seperti yang disampaikan oleh David C. Korten sebagaimana dikutip oleh Bahri et al. (2020), menggambarkan tiga elemen pokok, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasarannya. Korten menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada konsistensi ketiga aspek implementasi program tersebut.

- 1) Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat, merujuk pada keselarasan antara apa yang ditawarkan oleh program dengan kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok sasaran (penerima manfaat).
- 2) Kedua, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yang mengacu pada keselarasan antara tugas yang diamanatkan oleh program dengan kapasitas dan kemampuan organisasi yang menjalankan program.
- 3) Ketiga, kesesuaian antara penerima manfaat dan organisasi pelaksana, mencerminkan keselarasan antara persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mendapatkan hasil program dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran program.

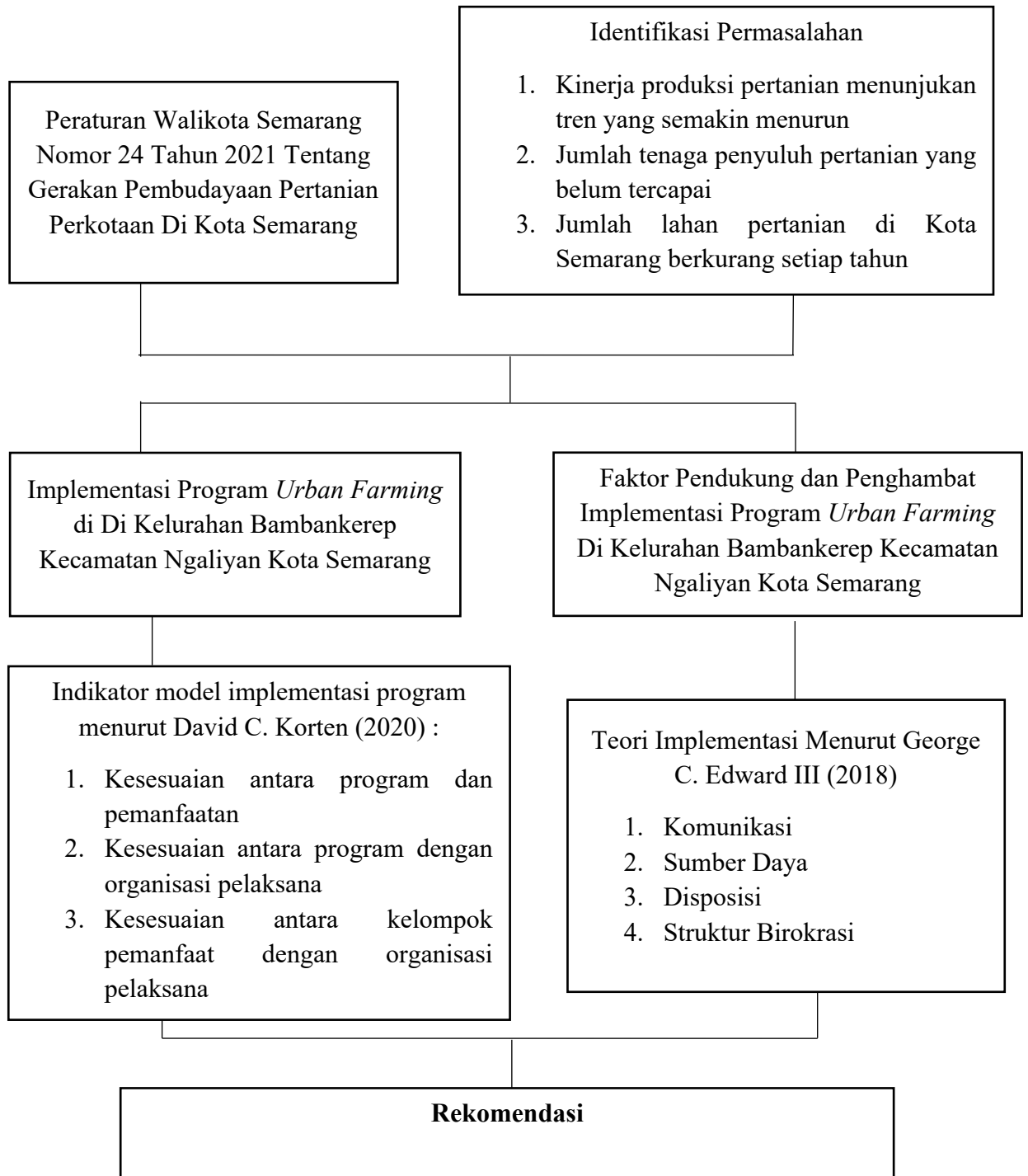


Gambar 1. 4 Model Kesesuaian Implementasi Kebijakan

Sumber : David C. Korten dikutip oleh (Bahri et al., 2020)

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 dan Teori Implementasi menurut David C. Korten & George C. Edward III

1.7 Operasionalisasi Konsep

Implementasi program *Urban Farming* merupakan pelaksanaan rangkaian kegiatan (sosialisasi, edukasi, konsultasi, pelayanan kunjungan, promosi) yang dilakukan oleh implementor (pemerintah, masyarakat, dan non – pemerintah) yang dapat dianalisis dengan fenomena sebagai berikut :

a. Kesesuaian antara program dan pemanfaatan

Dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pada keselarasan antara apa yang ditawarkan oleh program dengan kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok sasaran (penerima manfaat)

b. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana

Dalam penelitian ini digunakan untuk melihat keselarasan antara tugas yang diamanatkan oleh program dengan kapasitas dan kemampuan organisasi yang menjalankan program.

c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Dalam penelitian ini digunakan untuk mencerminkan keselarasan antara persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mendapatkan hasil program dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran program.

Untuk mencapai tujuan *Urban Farming* yang meliputi untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan gizi; memanfaatkan lahan dan/atau ruang; menciptakan lingkungan

yang sehat; dan/atau meningkatkan penghijauan serta pemanfaatan limbah rumah tangga.

Analisis implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dipengaruhi faktor pendorong dan penghambat melalui fenomena komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut penjelasan fenomena - fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah :

a. Komunikasi

Penyaluran dan konsistensi informasi dalam mengimplementasikan program program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo Kota Semarang. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana bentuk penyaluran dan tingkat kekonsistensian informasi dalam pelaksanaan program *Urban Farming* sehingga informasi dapat dipahami sasaran dan mengurangi kesalahan dalam penyampaian informasi.

b. Sumberdaya

Kemampuan sumber daya manusia dan anggaran dalam mengimplementasikan program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangrejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan anggaran dalam mengimplementasikan program *Urban Farming*.

c. Disposisi (Sikap)

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor dalam melaksanakan program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana watak dan karakteristik dalam mengimplementasikan program *Urban Farming*.

d. Struktur Birokrasi

Standard Operating Procedure (SOP) dan hubungan antar aktor dalam mengimplementasikan program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep Kota Semarang. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) dan hubungan antar aktor dalam pelaksanaan program *Urban Farming* sehingga informasi dapat dipahami sasaran dan mengurangi kesalahan dalam penyampaian informasi.

1.8 Argumen Penelitian

Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang telah diterbitkan untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. Salah satu program yang disebutkan dalam peraturan tersebut adalah Program *Urban Farming* yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan makanan sehat serta untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Melihat implementasi kebijakan pengembangan *Urban Farming* masih terdapat banyak kendala, terlihat dari beberapa masalah, misalnya kurangnya skills/kreativitas masyarakat Kota Semarang, serta kebutuhan prasarana umum yang belum memadai. Peneliti bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi program *Urban Farming* yang merupakan turunan dari misi ke tiga dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengamati obyek sebagaimana adanya, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi yang sesungguhnya di lapangan.

Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif merujuk pada jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta individu atau kelompok dengan detail. Sukmadinata (2009:18) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan definisi yang akurat terhadap keadaan atau fenomena tanpa mengalami perubahan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan memperhatikan kata-kata tertulis atau lisan serta mempertimbangkan pandangan dari narasumber lain. Peneliti, sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, secara langsung terlibat dalam proses penelitian dengan aktif melakukan wawancara dan mengumpulkan berbagai materi atau informasi terkait dengan Implementasi Program *Urban Farming*.

Untuk mencapai hasil penelitian, peneliti melakukan serangkaian langkah, termasuk pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, dan penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi di mana peneliti mengamati situasi yang sebenarnya terjadi pada objek yang sedang diteliti guna mendapatkan data dan informasi. Berdasarkan permasalahan yang diajukan, situs penelitian ditetapkan di Kelurahan Bambangrepep.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Kelurahan Bambangrepep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dikarenakan Kelurahan Bambangrepep adalah salah satu wilayah yang turut menerima bantuan program dari Dinas terkait. Serta mayoritas penduduk wanita yang menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini menawarkan peluang besar untuk memberdayakan mereka dalam pengembangan program *Urban Farming*. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang

diperoleh, para wanita ini dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan keberlanjutan program tersebut di lingkungan mereka.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian merujuk kepada individu atau organisasi yang diinginkan oleh peneliti untuk memberikan informasi atau menjadi fokus dari fenomena yang sedang diteliti. Menurut Moleong (Basrowi dan Suwandi, 2008:118), subyek penelitian adalah individu yang terlibat dalam penelitian, dengan penjelasan lebih lanjut subjek penelitian ini adalah individu yang memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang diperlukan mengenai situasi atau kondisi yang sedang diteliti, memastikan kedalaman pemahaman yang dibutuhkan dalam analisis.

Beberapa kriteria untuk memilih dan menetapkan subyek penelitian yang optimal, antara lain :

- Subjek penelitian telah terlibat secara intensif dan berkecimpung dalam bidang atau tugas yang relevan dengan penelitian selama periode waktu yang cukup lama.
- Subyek penelitian secara aktif dan sepenuhnya terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan bidang tersebut, menunjukkan keterlibatan yang sangat berarti dalam aspek yang sedang diteliti.

Dalam studi ini, informan dipilih melalui metode purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan berdasarkan pemahaman yang mendalam terkait dengan fokus masalah yang sedang diselidiki,

pertimbangan karakteristik dan kebutuhan analisis penelitian, peneliti memilih sejumlah informan yang dianggap relevan dan memiliki wawasan yang diperlukan, antara lain :

1. Kepala Kelurahan Bambankerep
2. Sekretaris Kelurahan Bambankerep
3. Kepala Seksi Sosial Kelurahan Bambankerep
4. Ketua PKK Kelurahan Bambankerep
5. Kelompok Wanita Tani (KWT) Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
6. Masyarakat Penerima Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Diharapkan kehadiran informan-informan tersebut dapat memberikan dukungan penting bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi serta data yang dibutuhkan untuk penelitian tentang Pelaksanaan Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

1.9.4 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47), dalam penelitian kualitatif, sumber data utama mencakup kata-kata, materi tertulis, gambar, dan juga sumber data tambahan seperti dokumen tertulis. Mereka menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data utama mencakup :

- a. Kata-kata

Data utama dalam penelitian adalah informasi yang berasal dari percakapan dengan informan yang diamati. Informasi tersebut biasanya direkam dan dapat didokumentasikan melalui pengambilan gambar atau rekaman suara.

b. Sumber tertulis

Sumber data kedua yang tak kalah pentingnya harus diperhatikan. Ragam sumber tertulis meliputi buku, jurnal ilmiah, arsip, catatan pribadi, dan dokumen resmi..

c. Foto

Menurut Bogdan dan Biklen (1982:102), dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis foto yang dapat digunakan, yaitu foto yang diambil oleh peneliti itu sendiri maupun foto yang diambil oleh orang lain.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber utama di mana data awalnya dihasilkan (Bungin, 2013:129). Data ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, seperti kelompok tani *Urban Farming*, anggota kelompok tani *Urban Farming*, pengurus *Urban Farming*, masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, informasi yang relevan yang tersedia secara daring, catatan, dan sumber lainnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014:62) menekankan bahwa langkah awal dan yang paling krusial dalam penelitian adalah langkah pengumpulan data, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data. Salah satu ciri penting dari penelitian kualitatif adalah keterlibatan peneliti sebagai penyusun keseluruhan skenario penelitian. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yang meliputi :

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara mendalam, atau wawancara mendalam, dalam proses pertukaran informasi antara peneliti dan informan. Dalam pendekatan ini, peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dengan menggunakan *interview guide* atau pedoman wawancara sebagai panduan.

b. Observasi

Peneliti melakukan peninjauan secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi; ini memungkinkan peneliti melihat dan mencatat fenomena yang terjadi secara langsung. Tujuan dari melakukan peninjauan secara langsung ini adalah untuk mendapatkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan secara independen dari pengaruh atau interpretasi orang lain.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dan informasi melalui gambar, dokumen, dan data resmi. Uji, penafsiran, dan bahkan hipotesis dilakukan menggunakan dokumen.

d. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan mempelajari buku, peraturan, laporan, artikel, dokumen resmi, dan sumber informasi lainnya, termasuk internet.

Dari uraian tersebut, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan objek penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007:248), analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengelola, menggabungkan, dan memilah data sehingga dapat dikelola dengan baik, mengidentifikasi data yang relevan, serta menentukan data mana yang dapat disampaikan kepada pihak lain.

Peneliti menerapkan model analisis data interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14). Berikut adalah aspek dalam analisis data :

1. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada langkah-langkah pengambilan, penyatuan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data dari berbagai sumber seperti catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Tujuannya adalah untuk mendekati inti dari seluruh informasi yang terdapat dalam catatan lapangan. Hasil dari proses kondensasi data ini merupakan ringkasan dari wawancara serta data tertulis yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian lapangan, di mana transkrip wawancara disortir untuk menemukan fokus penelitian yang relevan.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data melibatkan proses mengorganisir, menyatukan, dan menyajikan informasi yang telah diperoleh. Melalui langkah ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks penelitian dan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap informasi yang terkandung di dalamnya.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)

Penarikan Kesimpulan, di mana mereka mencari pemahaman yang tak terstruktur, mencatat pola penjelasan, dan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat. Tahap akhir dari penarikan kesimpulan adalah menyusun rangkuman dari seluruh data yang telah diperoleh peneliti.

1.9.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Keberhasilan sebuah penelitian kualitatif bergantung pada validitas data yang dihasilkan, yang mencakup kepercayaan, keotentikan, dan kebenaran terhadap informasi atau hasil yang didapat dari penelitian yang sudah dilaksanakan (Afiyanti & Rachmawati, 2014).

Menurut William Wiersma (Sugiyono, 2016:372), triangulasi dapat dibagi menjadi tiga jenis :

- a. Triangulasi Sumber merupakan validasi data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Setelah peneliti menganalisis data dan membuat kesimpulan, hasilnya diperiksa ulang (*member check*) dengan sumber data yang bersangkutan.
- b. Triangulasi Teknik adalah metode untuk memastikan kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, seperti wawancara, studi pustaka, dokumentasi, atau observasi.
- c. Triangulasi Waktu adalah validasi data dengan menggunakan sumber yang sama tetapi dalam rentang waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, kualitas dan kredibilitas data diperiksa melalui triangulasi sumber, di mana peneliti tidak hanya menggantungkan diri pada data dari satu sumber informan, tetapi juga melakukan wawancara dengan beberapa informan yang relevan untuk

memperoleh data yang sesuai dengan konteks di lapangan. Setelah itu, kebenaran data diverifikasi melalui analisis hasil wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi